



Sebelas Proyek Digeser Tahun Depan

Midji: Kita Rugi, Harga Satuan Barang Naik

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan bahwa tahun ini ada sebelas proyek pembangunan fisik yang harus ditunda pengerjaannya hingga tahun depan. Itu terjadi dikarenakan proses tender yang memakan waktu cukup lama, sehingga

tidak memungkinkan untuk mengejar pengerjaan proyek selesai di tahun ini.

"Ada sebelas proyek yang digeser, dari pada nanti masalah, geser dulu di 2020," ungkapnya saat memberikan sambutan pada pembukaan

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

BUKA MUSDA: Gubernur Kalbar Sutarmidji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Gapensi Kalbar di Hotel Mahkota, Selasa (26/11).

Sebelas Proyek Digeser Tahun Depan

Sambungan dari halaman 1

Musyawarah Daerah (Musda) XI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kalbar, Selasa (26/11).

Di tahun 2019 diakuinya memang proses perencanaan banyak yang dilakukan bersamaan dengan proyek fisik. Karena proyek fisik tidak mungkin selesai, akhirnya diputuskan tender dan pengerjaannya dimulai tahun depan.

Hal itu, kata Midji, sebetulnya membuat pemerintah rugi. Sebab harga satuan barang tiap tahunnya pasti akan mengalami kenaikan. "Kami sudah rugi, kalau misalnya ada Rp300-400 miliar, berarti ruginya sekitar Rp20-28 miliar karena selisih harga satuan ada kenaikan," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, ke depan ia berharap ada penyederhanaan dan percepatan proses penganggaran. Salah sa-

tunya, jika kegiatan proyek merupakan tahun jamak diperbolehkan dianggarkan dalam perubahan anggaran.

"Karena ketika perencanaan bersamaan dengan fisik itu tak mungkin bisa tender, fisiknya (baru) bisa dilaksanakan sekitar September, sehingga tidak akan selesai," paparnya.

Sebaliknya jika proyek tahun jamak tendernya bisa dilakukan saat perubahan anggaran, maka bakal menguntungkan. Karena harga satuan barang masih akan menggunakan harga di tahun berjalan, meski pengerjaannya tetap akan dimulai di tahun berikutnya. "Harusnya diperlonggar proyek *multi-years*, proyek yang tidak bisa selesai satu tahun boleh dimulai di perubahan anggaran," katanya.

Midji bercerita, saat masih menjabat sebagai wali kota hal itu sudah ia lakukan. Yakni di setiap perubahan anggaran pasti ada proyek *multi-years*, agar penyerapan

anggarannya benar-benar optimal. "Jadi ketika Januari, sudah ada kegiatan lanjutan," ucapnya.

Dalam hal ini, ia juga meminta Gapensi Kalbar mendorong, agar bagaimana ada satu percepatan. Tahapan-tahapan dalam tender di satu kegiatan harus dipersempit. Sehingga prosesnya tidak perlu memakan waktu yang lama dan bertele-tele. "Itu bagaimana bisa dipersempit. Presiden minta cepat-cepat tapi prosedurnya tak direformasi, maka tidak ada percepatan, sama saja," terangnya.

Selain itu Midji juga menuntut kepada para anggota Gapensi untuk bekerja profesional dan bisa mandiri dalam pembiayaan di setiap kegiatan proyek. "Jangan sampai nunggu termin dulu baru kerja, tidak ada termin tidak kerja. Masalahnya masih ada lagi yang kayak-kayak gitu. Jadi jangan ikut tender kalau tidak bisa," pungkasnya. (*bar*)